

**ANALISIS *FLYPAPER EFFECT* PADA DANA ALOKASI
UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DANA
BAGI HASIL (DBH) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) TERHADAP BELANJA DAERAH
(Studi pada Pemerintah Kabupaten /
Kota di Provinsi Jawa Tengah)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh :

DYAH PARASWATI
NIM. 4318057

**JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2022

**ANALISIS *FLYPAPER EFFECT* PADA DANA ALOKASI
UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DANA
BAGI HASIL (DBH) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) TERHADAP BELANJA DAERAH
(Studi pada Pemerintah Kabupaten /
Kota di Provinsi Jawa Tengah)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh :

DYAH PARASWATI
NIM. 4318057

**JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dyah Paraswati**

NIM : **4318057**

Judul Skripsi : **Analisis *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 1 Desember 2022

Yang menyatakan,



DYAH PARASWATI

NIM: 4318057

NOTA PEMBIMBING

Wahid Wachyu Adi Winarto, M.Si

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Dyah Paraswati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

c.q Ketua Jurusan Akuntansi Syariah

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : **Dyah Paraswati**

Nim : **4318057**

Judul Skripsi : **Analisis *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah)**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 23 November 2022

Pembimbing



Wahid Wachyu Adi Winarto, M.Si

NIP. 198410312019081001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.febi.uingusdur.ac.id email: febi.iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN


Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri
K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara:

Nama : **Dyah Paraswati**
NIM : **4318057**
Judul : **Analisis Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah).**

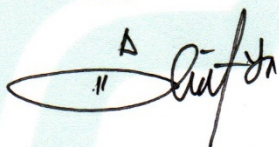
Telah diujikan pada hari Rabu, 14 Desember 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.).

Dewan Penguji,

Penguji I


Agus Arwani, M. Ag
NIP. 197608072014121002


Penguji II


Aditya Agung Nugraha, M.E
NIP. 199008112019031008

Pekalongan, 28 Desember 2022

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H.
NIP. 197502201999032001

MOTTO

“Do your best, pray and try”

“Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah”

(Bacharuddin Jusuf Habibie)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-ekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materil maupun non materil dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan skripsi ini:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Wahyudin dan Ibu Ta'imah yang ikhlas mengasuh dan mendidik. Terimakasih atas kasih sayang, dukungan serta pengorbanan yang begitu besar. Yang tak henti-hentinya mendo'akan untuk kebaikan dan kesuksesan saya. Dan Adik saya Fara Dita yang selalu menghibur dalam penulisan skripsi ini.
2. Keluarga dan saudara-saudara saya yang telah mendukung dan memberikan semangat.
3. Almameter saya Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Bapak Wahid Wachyu Adi Winarto, M.S.I yang selalu membimbing saya dengan sabar dan ikhlas.
5. Bapak Muhamad Nasrullah M.S.I selaku Dosen Wali yang selalu memberi saran dan nasehat akademik.
6. Sahabat tercinta Pidot, Puput, Cindy, Jilan, Tari, Ipeh, Tiyak, Lilis, Mbak Lia, Iskandar serta teman-teman saya yang lainnya yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terimakasih telah memberi semangat dan mendengarkan keluh kesah saya.

7. Teman-teman KKN kelompok 15 angkatan 51 yang telah melakukan kegiatan KKN bersama selama 45 hari.
8. Teman-teman seperjuangan Akuntansi Syariah Angkatan 2018 yang selalu memberi semangat dan dukungan.

ABSTRAK

DYAH PARASWATI. Analisis *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah).

Belanja daerah digunakan pemerintah provinsi, kabupaten/kota utamanya adalah untuk penyediaan pelayanan publik serta membiayai penyelenggaraan kewenangan urusan pemerintahan atas dasar peraturan perundang-undangan. Belanja daerah harus memuat prioritas belanja yang akan dilakukan pemerintah daerah agar langsung berdampak kepada kesejahteraan masyarakatnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terjadi atau tidaknya *flypaper effect* pada pengaruh DAU, DAK, DBH dan PAD terhadap belanja daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2020.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kuantitatif. Metode pengumpulan data adalah menggunakan teknik dokumentasi menggunakan data sekunder, yaitu laporan realisasi anggaran (LRA) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2018-2020 yang diperoleh dari BPKAD Provinsi Jawa Tengah. Populasi dan sampel pada penelitian ini adalah seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 35. Metode pengambilan sampel adalah metode sensus. metode analisis data yang digunakan adalah uji regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS 25.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) DAU berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah, (2) DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, (3) DBH berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah, (4) PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah, (5) DAU, DAK, DBH dan PAD berpengaruh secara simultan terhadap belanja daerah, (6) Terjadi fenomena *flypaper effect* di Provinsi Jawa Tengah.

Kata kunci : DAU, DAK, DBH, PAD, Belanja Daerah dan *Flypaper Effect*

ABSTRACT

DYAH PARASWATI. Flypaper Effect Analysis on General Allocation Funds (DAU), Special Allocation Funds (DAK), Revenue Sharing Funds (DBH) and Local Own Revenue (PAD) on Regional Expenditure (Studies on Regency/City Governments in Central Java Province).

Regional Expenditure is used by the provincial, district/city governments primarily for the provision of public services and for financing the implementation of government affairs authority on the basis of statutory regulations. Regional expenditure must include the priority of spending to be carried out by the regional government so that it directly impacts the welfare of its people. This study aims to analyze whether or not a flypaper effect has occurred in the influence of DAU, DAK, DBH and PAD on regional expenditure in Central Java Province in 2018-2020.

This research is included in the type of quantitative research. The data collection method is to use documentation techniques using secondary data, namely district/city budget realization reports (LRA) in Central Java Province for the 2018-2020 fiscal year obtained from the Central Java Province BPKAD. The population and sample in this study were all district/city governments in Central Java Province, totaling 35. The sampling method was the census method. The data analysis method used is multiple linear regression with the help of SPSS 25 software.

The results showed that (1) DAU has a significant positive effect on regional expenditures, (2) DAK does not have a significant effect on regional expenditures, (3) DBH had a significant effect on regional expenditures, (4) PAD has a significant positive effect on regional expenditures, (5) DAU, DAK, DBH and PAD have a simultaneous effect on regional expenditures, (6) the phenomenon of the flypaper effect occurred in Central Java Province.

Keywords: DAU, DAK, DBH, PAD, Regional Expenditure and Flypaper Effect

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi Jurusan Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M. Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. H. Tamamudin selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ade Gunawan, M.M selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Ria Anisatus Sholihah, M.S.A., C.A selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Wahid Wachyu Adi Winarto, M.S.I selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Muhammad Nasrullah M.S.I selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA).
8. Agus Arwani, M.Ag selaku penguji I.
9. Aditya Agung Nugraha, M.E selaku penguji II.
10. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan dukungan material dan moral.

11. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 1 Desember 2022



Dyah Paraswati

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GRAFIK	xxiii
DAFTAR GAMBAR	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Landasan Teori	15
B. Telaah Pustaka	28
C. Kerangka Berfikir	36
D. Hipotesis	37
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	44
B. Setting Penelitian	44
C. Populasi dan Sampel.....	44
D. Variabel Penelitian	45
E. Teknik Pengumpulan Data Penelitian.....	47
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	48
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	55
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	55
B. Deskripsi Data Penelitian	56
C. Pengujian dan Hasil Analisis Data	56
D. Pembahasan	78
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Keterbatasan Penelitian	88
C. Saran	88
D. Implikasi Teoritis dan Praktis.....	90

DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN	I

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab – Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1977 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	sa	š	es (dengan tiik atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	ž	zet (dengan titik diatas)

ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titi di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal dilambangkan dengan tanda dan harkat.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dilambangkan dengan gabungan antara harkat dan huruf.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َـِ	Fathah dan ya	Ai	adan i
َـِو	Fathah dan wau	Au	adan u

3. Maddah (Vokal Panjang)

Dilambangkan dengan harkat dan huruf, ditransliterasikan dengan huruf dan tanda.

Contoh:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ي...ا	Fathah dan alif atau ya	A	Adan garis di atas
ي...ي	Kasrah dan ya	I	Idan garis diatas
و...و	Hammah dan wau	U	Udan garis diatas

4. Ta' marbutah

1) Ta' marbutah hidup

Ta'marbutah yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2) Ta' marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3) Jika pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

rauḍah al-aṭfāl

rauḍatulafāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

al-Madīnah al-Munawwarah

al-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَة

talḥah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

رَبَّنَا

ditulis *rabbanā,*

الْبِرِّ

ditulis *al-birr*

نَزَّلَ

ditulis *nazalla*

الْحَجِّ

ditulis *hajj*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qomariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf/1/diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti dengan huruf qomariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

3. Baik huruf Syamsiyah dan Qomariyah kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dibandingkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرجل	ditulis	<i>ar-rajulu</i>
السيد	ditulis	<i>as-sayyidu</i>
السمس	ditulis	<i>as-syamsu</i>
القلم	ditulis	<i>al-qalamu</i>

7. Hamzah

Transliterasi hamzah dengan apostrof hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	ditulis	<i>ta'khuzūna</i>
النَّوْ	ditulis	<i>an-nau'</i>
شَيْءٌ	ditulis	<i>syai'un</i>
أَكَلَ	ditulis	<i>akala</i>
أَمْرٌ	ditulis	<i>umirtu</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

Ibrahim al-Khalil

Ibrahimul-Khalil

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

Wa auf al-kaila wa-almizān

Wa auf al-kaila wal mizān

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf capital digunakan untuk meuliskan huruf awal mula diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdulillahirabbil al-'alamin

Alhamdulillahirabbil'alamin

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ wa ma muhammadun illa rasl

Penggunaan huruf awal capital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak digunakan.

Contoh:

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillahi al-'amrujami'an

Lillahi'amrujami'an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Penerimaan, 7
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu, 29
Tabel 3.1	Operasional Variabel, 46
Tabel 4.1	Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 56
Tabel 4.2	Hasil Uji Statistik Deskriptif, 57
Tabel 4.3	Hasil Uji Normalitas, 61
Tabel 4.4	Hasil Uji Multikolinearitas, 63
Tabel 4.5	Hasil Uji Heteroskedastisitas, 64
Tabel 4.6	Hasil Uji Linearitas, 66
Tabel 4.7	Hasil Uji Autokorelasi, 67
Tabel 4.8	Hasil Uji Linear Berganda, 67
Tabel 4.9	Hasil Uji t, 70
Tabel 4.10	Hasil Uji F, 74
Tabel 4.11	Hasil Uji Koefisien Determinasi, 76
Tabel 4.12	Hasil Uji Koefisien Determinasi Simultan, 76
Tabel 4.13	Hasil Uji Koefisien Determinasi PAD, 77
Tabel 4.14	Hasil Perbandingan DAU, DAK, DBH secara simultan dan PAD secara parsial, 77

DAFTAR GRAFIK

- Grafik 1.1 Pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah Tahun 2018-2020, 4

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 Kerangka Berfikir, 36
- Gambar 3.1 Kurva Uji t, 52
- Gambar 3.2 Kurva Uji F, 53
- Gambar 4.1 Hasil Uji P-P Plot, 62
- Gambar 4.2 Kurva Penerimaan H_1 , 71
- Gambar 4.3 Kurva Penerimaan H_2 , 72
- Gambar 4.4 Kurva Penerimaan H_3 , 72
- Gambar 4.5 Kurva Penerimaan H_4 , 73
- Gambar 4.6 Kurva Penerimaan H_5 , 75

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Data Penelitian, I
- Lampiran 2 Output Uji Statistik Deskriptif, VI
- Lampiran 3 Output Uji Normalitas One Sampel Kolmogorof, VI
- Lampiran 4 Output Uji P-P Plot, VII
- Lampiran 5 Output Uji Multikolinearitas, VII
- Lampiran 6 Output Uji Heteroskedastisitas Rank Spearman/Spearman Rho,
VIII
- Lampiran 7 Output Uji Linearitas, VIII
- Lampiran 8 Output Uji Autokorelasi Durbin Watson, IX
- Lampiran 9 Output Uji Regresi Linear Berganda, IX
- Lampiran 10 Output Uji T, X
- Lampiran 11 Output Uji F, X
- Lampiran 12 Output Uji Koefisien Determinasi, X1
- Lampiran 13 Tabel Distribusi t, XII
- Lampiran 14 Tabel Distribusi F, XIII
- Lampiran 15 Daftar Riwayat Hidup, XIV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah sebagai pelaksana pemerintahan memiliki kewajiban dalam mewujudkan tujuan dari Negara Indonesia, yaitu menyelenggarakan kesejahteraan rakyat seperti yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 serta mengatur urusan yang berkaitan dengan kepentingan negara lainnya. Pengelolaan pemerintah yang baik harus sesuai dengan *good governance government* atau tata kelola pemerintahan yang baik. Pengelolaan keuangan negara maupun daerah harus memenuhi dua aspek yaitu, akuntabel dan transparan (Arfianti, et al., 2011). Keduanya merupakan hal yang sangat penting dalam pemerintahan terutama dalam masalah keuangan, dikarenakan kedua prinsip tersebut akan menjadikan pemerintahan yang dapat dipercaya dalam pelaksanaan tugasnya. Menurut Mardiasmo (2018), akuntabilitas publik merupakan pengungkapan atau pemberian informasi kepada pihak yang berkepentingan berkaitan dengan kinerja serta aktivitas keuangan pemerintah daerah. Pemenuhan dua aspek tersebut diharapkan memudahkan publik atau pengguna dari laporan keuangan untuk mendapatkan informasi yang berkenaan dengan pencapaian hasil atau kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Djawang et al., 2020).

Pemerintah daerah baik provinsi serta kabupaten/kota diberikan hak dan kewajiban untuk melaksanakan prinsip otonomi daerah, mengatur dan

mengelola urusan pemerintahannya tanpa ada keterlibatan dari pemerintah pusat (M. Rahmawati & Fajar, 2017). Pemberlakuan prinsip otonomi daerah menjadikan pemerintah daerah memiliki wewenang serta tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah kerjanya. Tujuan diterapkannya otonomi daerah tidak lain adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan daerah serta pelayanan publik yang efektif dan cepat tanggap selaras dengan kebutuhan maupun potensi yang ada di daerah. Penerapan otonomi daerah memberikan dampak adanya desentralisasi fiskal. Adanya desentralisasi tidak lain adalah untuk menjawab atas permasalahan agar kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan, pelayanan kepada publik, serta pengembangan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, adanya pemerataan antar daerah, dan sebagai upaya untuk memelihara hubungan yang etis pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ataupun hubungan antar pemerintah daerah yang lain (Oktavia, 2015).

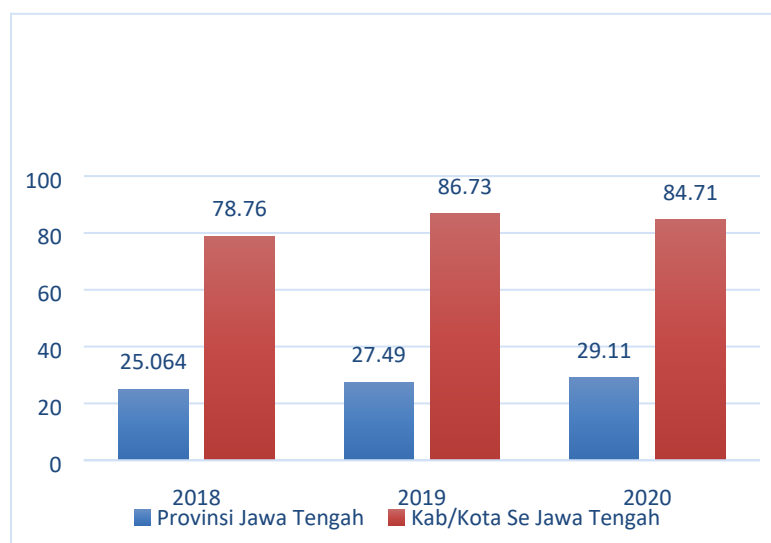
Pemerintah daerah berkewajiban untuk melakukan penyusunan rancangan keuangan daerah, yang dalam penyusunannya harus sesuai dengan peraturan dalam perundang-undangan atau peraturan pemerintah yaitu dengan membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berisi rincian pendapatan dan pengeluaran di suatu daerah serta pembiayaan daerah sebagai penutup defisit anggaran tahun bersangkutan. APBD dibahas dan disahkan oleh pemerintah daerah selaku pihak eksekutif dan pihak legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kemudian ditetapkan dengan Peraturan

Daerah (Perda). APBD bertujuan agar pemerintah daerah bisa mengestimasi besaran pendapatan serta pengeluarannya dalam satu tahun anggaran (Amalia, 2015). Pemerintah daerah menjadikan APBD sebagai gambaran kebijakan yang diambil untuk pelaksanaan program. Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa anggaran sektor publik penting dibuat sebagai penentu tingkat kebutuhan masyarakat. Keputusan pemerintah terkait anggaran yang dibuat akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Apabila perencanaan terkait pengeluaran lemah maka kemungkinan akan terjadi *under financing* atau *over financing*, keduanya akan mempengaruhi efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Armawaddin et al., 2017).

Belanja daerah digunakan pemerintah provinsi, kabupaten/kota utamanya adalah untuk penyediaan pelayanan publik serta membiayai penyelenggaraan kewenangan urusan pemerintahan atas dasar peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan otonomi, Pemerintah daerah diwajibkan untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan efisien, hal tersebut harus dilakukan karena jika pengeluaran dalam anggaran besar maka dibutuhkan pula biaya yang besar untuk mendanai. Dalam belanja daerah harus memuat prioritas belanja yang akan dilakukan pemerintah daerah agar langsung berdampak kepada kesejahteraan masyarakatnya. Namun pada umumnya permasalahan keuangan terutama menyangkut pendapatan yang ada pada pemerintah daerah saat ini dalam APBD, kontribusi PAD lebih kecil daripada

dana perimbangan, hal ini yang menjadikan pengeluaran belanja daerah lebih banyak dibiayai oleh dana perimbangan daripada PAD.

Grafik 1.1 Pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah & Pemerintah Kab/Kota se Jawa Tengah Tahun 2018-2020 (Dalam Trilyun Rupiah)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (Data diolah)

Berdasarkan data Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah Tahun 2018-2020, pengeluaran daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan dari tahun 2018-2020. Pada tahun 2018 adalah Rp 25,064 trilyun, tahun 2019 sebesar Rp 27,49 trilyun kemudian pengeluaran tahun 2020 sebesar Rp 29,11 trilyun. Pengeluaran daerah kabupaten/kota se Jawa Tengah pada tahun 2018 sebesar Rp 78,76 trilyun, tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp 86,73 trilyun, dibandingkan tahun sebelumnya pada tahun 2020 pengeluaran daerah pemerintah kabupaten/kota se Jawa Tengah sedikit mengalami penurunan menjadi Rp 84,71 trilyun. Adanya peningkatan pengeluaran/belanja daerah

diharapkan pemanfaatannya berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah melalui efisiensi dan efektifitas program pembangunan serta pelayanan publik yang baik.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. Dana Perimbangan menjadi sumber pendapatan daerah dari transfer pendapatan APBN dan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah. DAU berfungsi untuk instrumen pemerata keuangan antar daerah di Indonesia yang digunakan dalam mendanai belanja daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (DJPK Kemenkeu, 2022). Presentase transfer DAU dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah adalah 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Bersih yang telah ditetapkan dalam APBN (Oktavia, 2015). Prioritas transfer DAU diberikan kepada pemerintah daerah yang pendapatannya rendah, namun DAU juga diberikan kepada pemerintah daerah yang pendapatannya tinggi, tetapi transfer yang didapatkan akan lebih rendah daripada daerah yang mempunyai pendapatan yang rendah.

DAK diberikan ke daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus urusan daerah sejalan dengan prioritas nasional (DJPK Kemenkeu, 2022). DAK dibagi menjadi 2 yaitu DAK Fisik dan DAK Non Fisik. DAK Fisik bertujuan untuk mencapai peningkatan serta pemerataan pada infrastruktur pelayanan publik. Sedangkan DAK Non Fisik bertujuan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan khusus non fisik dalam usaha untuk

meningkatkan kualitas serta akses masyarakat atas pelayanan publik seperti pada bidang pendidikan dan kesehatan (DJPB Kemenkeu, 2022).

DBH dialokasikan atas dasar presentase tertentu. Transfer dari pemerintah pusat berupa DBH terdiri dari DBH Pajak dan DBH Bukan Pajak/sumber daya alam (DJPK Kemenkeu, 2022). Sumber penerimaan DBH Pajak adalah dari PPh Pasal 21, PPh Pasal 25, Pasal 29 yaitu PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. PPh perorangan ditetapkan sebagai objek DBH adalah untuk menyeimbang dan kompensasi daerah yang berkontribusi besar dalam pendapatan negara (APBN) tetapi tidak mempunyai SDA. Sedangkan penerimaan DBH Bukan Pajak/SDA bersumber dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan gas bumi, pertambangan minyak bumi (Mulyati & Yusriadi, 2017). Fungsi lain dari penggunaan dana perimbangan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah kabupaten/kota masing-masing. Hal tersebut memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menggunakan secara efektif dan efisien agar tercipta pelayanan masyarakat yang baik disertai dengan pertanggungjawabannya (Oktavia, 2015).

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah serta dipungut atas dasar Perda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari pungutan hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain yang sah (Nabilah, et al., 2016). Desentralisasi fiskal memberikan ruang gerak kepada pemerintah daerah untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan potensi

daerah agar memaksimalkan penerimaan PAD. Penerimaan PAD yang semakin tinggi, maka banyak kebutuhan yang bisa dibiayai oleh PAD. PAD sangat menentukan kemampuan kerja dari keuangan daerah. PAD menjadi tulang punggung pembiayaan daerah, apabila PAD yang didapatkan besar maka kecil kemungkinan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Pada kenyataannya penerimaan PAD di pemerintah daerah relatif lebih kecil sehingga kekurangan dana pada anggaran dicover oleh dana transfer (Amalia, 2015). Berikut adalah data ringkasan penerimaan pendapatan daerah kabupaten/kota se Jawa Tengah tahun 2018-2020:

Tabel 1.1 Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Penerimaan (Dalam Trilyun Rupiah)

Jenis Penerimaan	Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah		
	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
- Pendapatan Asli Daerah	12,138	14,23	14,40
- Dana Perimbangan:	46,246	47,16	47,66
1. Dana Alokasi Umum	33,485	35,06	35,16
2. Dana Alokasi Khusus	10,869	10,74	10,92
3. Dana Bagi Hasil:			
- Bagi Hasil Pajak	1,786	1,22	1,50
- Bagi Hasil Bukan Pajak	0,106	0,14	0,08

Sumber: Data Ringkasan APBD, BPS Provinsi Jawa Tengah

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa PAD pada tahun 2018 anggaran yang dikumpulkan yakni sebesar 12,138 trilyun, tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 14,23 trilyun, dan pada tahun 2020 mengalami sedikit

peningkatan kembali sebesar 14,40 trilyun. Untuk penerimaan transfer dana alokasi umum terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu 3 tahun, pada tahun 2018 sebesar 33,485 trilyun kemudian pada tahun 2019 sebesar 35,06 trilyun, dan tahun 2020 sebesar 35,16 trilyun. Dana alokasi khusus anggaran yang diperoleh tahun 2018 sebesar 10,869 trilyun, tahun 2019 sebesar 10,74 trilyun dan tahun 2020 sebesar 10,92 trilyun. Sementara penerimaan bagi hasil pajak pada tahun 2018 sebesar 1,786 trilyun, tahun 2019 1,22 trilyun dan pada tahun 2020 sebesar 1,50 trilyun. Penerimaan bagi hasil bukan pajak pada tahun 2018 sebesar 0,106 trilyun, pada tahun 2019 sebesar 0,14 trilyun dan pada tahun 2020 sebesar 0,08 trilyun. Jika dilihat pada tabel diatas, penerimaan daerah paling banyak berasal dari transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat yang bertujuan sebagai pemerata fiskal antar daerah di Indonesia. Anggaran dana perimbangan terus mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai ke tahun 2020, tandanya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer masih tinggi.

Fenomena yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah target PAD pada tahun 2020 berkurang sebanyak Rp 1,9 trilyun. Gubernur Jawa Tengah menjelaskan bahwa penurunan pendapatan terbesar berasal dari pajak kendaraan bermotor. Angka Rp 1,9 trilyun diperkirakan hampir 12,5 %, menurutnya kehilangan pendapatan terbesar dari pajak kendaraan bermotor, terutama pada bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), di satu sisi hal ini merupakan indikasi bahwa konsumsi dan daya beli masyarakat terutama kebutuhan tersier menurun. Hal ini agar dijadikan bahan pertimbangan pemerintah daerah untuk

bangkit secara ekonomi dengan melihat peluang ekonomi lokal di masing-masing daerah (Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2020). Alasan mengapa peneliti tidak menggunakan data penelitian dari laporan realisasi anggaran tahun yang terbaru adalah pada saat proses pengajuan data ke PPID Provinsi Jawa Tengah yang ditujukan ke BPKAD Provinsi Jawa Tengah peneliti sudah mengajukan sampai tahun anggaran 2021, dikarenakan pada saat itu tahun laporan realisasi anggaran tahun 2021 masih tahap konsolidasi atau tahap audit dengan BPK RI, sehingga data yang digunakan pada penelitian ini adalah tahun anggaran 2018-2020.

Ketika pemerintah daerah menanggapi belanja daerahnya lebih banyak menggunakan dana perimbangan daripada PAD, maka terjadi fenomena *flypaper effect* (Desi, 2014). Terjadinya *flypaper effect* yakni apabila output hasil dari pengujian menunjukkan koefisien dari dana perimbangan lebih besar daripada koefisien PAD, serta ketika nilai koefisien PAD tidak signifikan (Maimunah, 2006). Kemudian asumsi penentuan adanya *flypaper effect* yaitu dengan membandingkan antara pengaruh PAD serta dana perimbangan pada belanja daerah. *Flypaper effect* mengimplikasikan lebih luas bahwa dana perimbangan akan meningkatkan belanja daerah lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaan transfer (Nurdini et al., 2015).

Riset yang dilakukan oleh (Melda & Syofyan, 2020), menyatakan bahwasanya secara parsial DAU, DAK dan PAD memberi pengaruh yang mengarah positif pada belanja daerah akan tetapi DBH tidak memberikan pengaruh pada belanja daerah. Telah terjadi *flypaper effect* pada pemerintah

kabupaten/kota di Sumatera Barat, dan menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Sumatera Barat masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Kemudian penelitian (Fadilah & Helmayunita, 2020), yang menyatakan DAU, DBH, PAD memberi pengaruh yang mengarah positif terhadap belanja daerah, namun DAK tidak memberi pengaruh terhadap belanja daerah, serta terjadi *flypaper effect* pada belanja daerah Pemerintah Provinsi di Indonesia. Penelitian yang dilakukan (Ekawarna, 2017), menyatakan bahwa secara parsial PAD dan DAU memiliki pengaruh pada belanja daerah, sedangkan variabel DAK dan DBH tidak memberi pengaruh pada belanja daerah, serta tidak terjadi *flypaper effect* pada daerah induk dan pemekaran di Provinsi Jambi, artinya kebijakan belanja daerah pada daerah induk dan pemekaran kabupaten/kota di provinsi Jambi pada tahun anggaran 2011-2013 lebih di dominasi oleh penerimaan PAD dibandingkan oleh DAU. Adanya perbedaan hasil penelitian ini tidak bisa direalisasikan sama rata ke seluruh daerah di Indonesia karena setiap daerah mempunyai kondisi dan latar belakang serta mempunyai perbedaan penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengambil judul penelitian yakni: **“Analisis *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah DAU berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah?
2. Apakah DAK berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah?
3. Apakah DBH berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah?
4. Apakah PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah?
5. Apakah DAU, DAK, DBH dan PAD berpengaruh secara simultan terhadap belanja daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah?
6. Apakah terjadi *flypaper effect* pada DAU, DAK, DBH dan PAD terhadap belanja daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat diketahui tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis apakah DAU memiliki pengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

2. Untuk menganalisis apakah DAK memiliki pengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
3. Untuk menganalisis DBH memiliki pengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
4. Untuk menganalisis apakah PAD memiliki pengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
5. Untuk menganalisis apakah DAU, DAK, DBH dan PAD memiliki pengaruh secara simultan terhadap belanja daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah
6. Untuk menganalisis terjadi atau tidaknya *flypaper effect* pada pengaruh DAU, DAK, DBH dan PAD terhadap belanja daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Peneliti

Untuk mengembangkan pemikiran atas apa yang sudah didapatkan selama proses perkuliahan sehingga bisa memberikan solusi ataupun referensi untuk memecahkan masalah/persoalan ataupun penelitian yang berkaitan dengan belanja daerah dilihat dari segi DAU, DAK, DBH, PAD serta analisis *flypaper effect*.

b. Bagi Akademisi

Lewat penelitian ini diharapkan bisa memperluas khasanah keilmuan atau pengetahuan di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, berkaitan dengan belanja daerah dilihat dari segi DAU, DAK, DBH, PAD serta analisis *flypaper effect* yang kemudian bisa dijadikan bahan referensi dalam penelitian selanjutnya sehingga dapat dikembangkan teori ataupun praktiknya.

2. Manfaat Praktis

Bagi pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dapat menjadikan hasil dari penelitian sebagai bahan masukan dalam penyusunan kebijakan terkait dengan belanja daerah agar digunakan secara efisien dan efektif serta dalam menggali potensi PAD yang maksimal.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Mencakup landasan teori sebagai pedoman pemecahan masalah, penelitian terdahulu sebagai pendukung, kerangka berfikir serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Mencakup jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, variable penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, analisis data dan pembahasan yang menjelaskan tentang deskripsi data, deskripsi variabel penelitian.

BAB V PENUTUP

Bagian ini terkait dengan penyampaian simpulan dari riset, keterbatasan riset serta implikasi praktis dan teoritis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar pada analisis dan pembahasan serta hasil pengujian yang telah dijelaskan di atas, sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. DAU berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah. Artinya semakin banyak DAU yang diterima oleh pemerintah daerah akan berdampak pula pada pengeluaran belanja daerah yang semakin besar.
2. DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. DAK hanya digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional dan menjadi urusan daerah.
3. DBH berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah. Artinya pemerintah daerah yang transfer dana bagi hasilnya tinggi maka cenderung akan meningkatkan belanja daerah yang tinggi juga.
4. PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah. Yang berarti semakin tingginya PAD, maka pengeluaran belanja daerah juga akan meningkat.
5. DAU, DAK, DBH dan PAD secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap belanja daerah. Dikarenakan belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah

dipengaruhi oleh meningkatnya DAU, DAK, DBH dan PAD sesuai dengan kebutuhan daerah.

6. Terjadi fenomena *flypaper effect* pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah

B. Keterbatasan Penelitian

Dari hasil analisis dan juga penjelasan yang sudah diuraikan di atas, maka dalam hal ini penulis akan memaparkan beberapa keterbatasan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya mengambil populasi dan sampel yaitu pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
2. Periode yang relatif terbatas, karena penelitian yang dilakukan ini hanya mengambil data penelitian selama 3 tahun anggaran yaitu tahun 2018-2020.
3. Penelitian ini hanya berfokus pada fenomena *flypaper effect* pada pengaruh DAU, DAK, DBH dan PAD terhadap belanja daerah saja, dikarenakan keterbatasan kemampuan, waktu dan tenaga penulis.

C. Saran

Berdasar pada kesimpulan di atas adapun saran yang dapat penulis berikan terkait dengan hasil penelitian, antara lain:

1. Diharapkan kepada pemerintah daerah khususnya di lingkup Provinsi Jawa Tengah untuk menggali lagi potensi-potensi daerah yang masih belum optimal pemanfaatannya dengan cara mengeksplor kembali potensi-potensi

daerah secara intensif yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah terutama seperti intensifikasi penerimaan pajak daerah yang masih banyak belum terserap dengan maksimal. Hal tersebut harapannya kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat meningkat.

2. Pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah harapannya lebih bisa memanfaatkan pendapatannya yang diperoleh baik dari PAD ataupun dana transfer atau pendapatan yang lain agar digunakan secara efektif dan efisien dengan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik yang nantinya dapat meningkatkan perekonomian daerah. Seperti membangun akses jalan ke tempat yang memiliki potensi yang dapat meningkatkan PAD, seperti akses ke sentra produksi daerah ataupun tempat yang memiliki potensi wisata.
3. Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk memperluas populasi atau sampel penelitian seperti seluruh Provinsi di Indonesia atau seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia dan menambah periode tahun anggaran yang terbaru.
4. Untuk peneliti selanjutnya harapannya untuk menambahkan variabel lain yang lebih bervariasi sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang kompleks, seperti lain-lain pendapatan yang sah, SiLPa, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya.

D. Implikasi Teoritis dan Praktis

1. Implikasi Teoritis

Dalam penelitian ini, peneliti berharap hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan referensi pada penelitian selanjutnya dengan mengembangkan penelitian di masa yang akan datang. Serta memberikan kontribusi untuk perkembangan teori penganggaran sektor publik khususnya dalam belanja daerah, dilihat dari segi DAU, DAK, DBH, PAD serta analisis *flypaper effect*.

2. Implikasi Praktis

Dengan adanya fenomena *flypaper effect* pada hasil penelitian, diharapkan mampu mendorong kemandirian daerah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan otonomi daerah dengan menggali potensi daerahnya melalui perencanaan program yang dapat meningkatkan penerimaan PAD seperti mengencarkan sosialisasi kepada masyarakat luas atas program pemerintah dalam pemberian stimulus pajak daerah kepada masyarakat, dalam hal ini berupa bebas denda administrasi, dan bebas bea balik nama kendaraan bermotor dengan mendayagunakan serta memaksimalkan pelayanan pembayaran pajak dengan melalui Samsat Induk, Samsat Keliling, Samsat Malam, dan aplikasi SAKPOLE hal tersebut perlu dilakukan karena pajak kendaraan bermotor merupakan sumber pendapatan terbesar provinsi Jawa Tengah. Strategi yang lain yaitu melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah, pengoptimalan lain-lain PAD yang sah sebagai

bentuk win-win solution karena tidak mempengaruhi langsung atau tidak membebani masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, I. M. P. (2014). Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol. 3 No. 2, 1232-1261.
- Amalia, F., (2015). Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Banten. 11, 11.
- Armawaddin, M., Rumbia, W. A., & Afiat, M. N. (2017). Analisis Flypaper Effect Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 18 (1), 77-91.
- Arfianti, D., & Kawedar, W. (2011). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang) *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Astutik, E. N. (2016). Analisis *Flypaper Effect* Pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2008 - 2014. *Skripsi*. Universitas Sanata Darma. Yogyakarta. 1-99.
- Azhar, M. R. (2018). *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Baghiu, E. T., Walewangko, E. N., & Niode, A. O. (2021). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Kepulauan Sangehe. 21(03), 11.
- Bappeda Provinsi Jawa Tengah (2020). <https://bappeda.jatengprov.go.id/gegara-covid-19-pad-jateng-turun-rp-19-trilyun/>
- BPS Provinsi Jawa Tengah. (2020). jateng.bps.go.id Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah 2018-2020.
- BPS Provinsi Jawa Tengah. (2020). jateng.bps.go.id. Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
- Djawang, R. R. P., Made, A., & Sari, A. R. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 7(2). <https://doi.org/10.21067/jrma.v7i2.4257>

- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Formulasi Alokasi Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa*. Djpk Kemenkeu RI.
- Ekawarna, S. U. (2017). Analisis Flypaper Effect pada Belanja Daerah (Studi Komparasi Daerah Induk dan Pemekaran kabupaten/kota di Provinsi Jambi). *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 4(3), 167–184. <https://doi.org/10.22437/ppd.v4i3.3639>
- Fadilah, H., & Helmayunita, N. (2020). Analisis Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(3), 3144–3159. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i3.273>
- Facruzzaman. Suranta, E., & Martini, E. (2015). Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Kota dan Kabupaten Di Indonesia. *Jurnal Fairness*, 5 (3), 123-138
- Fatimah, N. N., Nopiyanti, A., & Mintoyuwono, D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah. *EQUITY*, 22(2), 197–214. <https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.936>
- Ferdiansyah, I., Deviyanti, D. R., & Pattisahusiwa, S. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. 9.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit UNDIP.
- Juniawan, M. A., & Suryantini, N. P. S. (2018). Pengaruh PAD, DAU Dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(3), 1255. <https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2018.v7.i03.p05>
- Kementerian Dalam Negeri. (2006). *Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Kemendagri. Jakarta
- Latan, H., & Temalagi, S. (2013). *Analisis Multivariate Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program IBM SPSS 20.0*. Alfabeta.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI.
- Melda, H., & Syofyan, E. (2020). Analisis Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat.

Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 2(2), 2826–2838.
<https://doi.org/10.24036/jea.v2i2.252>

- Mulyati, S., & Yusriadi. (2017). Dana Bagi Hasil Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 1 (2).
- Nasution, A. A. (2015). The Effect Of Fiscal Potential And Needs On Regional Bottom Aid Model (BDB) In North Sumatera Province. *European Journal of Accounting And Finance Research*, 3 (2), 70-86
- Nurdini, R., Wiratno, A., & Farida, Y. N. (2015). Analisis Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (Bd) Kabupaten/Kota Di Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAKA)* 2 (1).
- Oktavia, D. (2015). Flypaper Effect: Fenomena Serial Waktu Dan Lintas Kabupaten Kota Di Jawa Timur 2003-2013. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 12(2), 1. <https://doi.org/10.19184/jauj.v12i2.1407>
- Pramuka, B. A. (n.d.). Flypaper Effect Pada Pengeluaran Pemerintah Daerah Di Jawa. 11, 12.
- Purnomo, R. A. (2016). Analisis Statistik Ekonomi Dan Bisnis Dengan SPSS. CV. WADE GROUP.
- Qs Al An'am 165
- Rahajeng, A. (2016). Perencanaan Penganggaran Keuangan Daerah. Gadjah Mada University Press.
- Republik Indonesia. (2004). UU tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat.
- Republik Indonesia. (2009). UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah Pusat.
- Rahmawati, L. A. (2015a). Flypaper Effect Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah. 4(9), 20.
- Rahmawati, M., & Fajar, C. M. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(1). <https://doi.org/10.33603/jka.v1i1.445>
- Santoso, S. (2012). Panduan Lengkap SPSS Versi 20. PT. Elex Media Komputindo.

- Sanusi, A. (2011). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Salemba Empat.
- Sasana, H. (2011). Analisis Determinan Belanja Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Dalam Era Otonomi Dan Desentralisasi Fiskal. 18(1), 13.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Manajemen*. CV. Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2019). *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*. Pustaka Baru Press.
- Susilowati, D., & Sitingjak, C. A. D. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1 (1), 183-191.
- Wahida, N. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Konawe Utara. *Skripsi*. Universitas Hasanudin. Makasar.
- Wikipedia. (2022). Jawa Tengah. Wikipedia Indonesia. https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
- Wulansari, D. T. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis Flypaper Effect (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat) Dalam Periode tahun 2012-2013. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.